

Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di SD Kota Banjarmasin

Vivi Aulia⁽¹⁾, M.Saufi⁽²⁾

^{1,2} STKIP PGRI Banjarmasin, Indonesia

Email: ¹viviaulia@stkipbjm.ac.id, ²muhammadsaufi@stkipbjm.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SD Kota Banjarmasin melalui penerapan tujuh komponen manajemen pada MBS. Penelitian ini berjenis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data penelitian digali dengan wawancara. Sebanyak lima Kepala Sekolah/Wakil Kepala Sekolah/pengajar di jenjang SD sederajat di Kota Banjarmasin yang dipilih secara acak diwawancarai mengenai implementasi MBS sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing berdasarkan indikator MBS. Data hasil wawancara kemudian dianalisis dengan menggunakan langkah Miles and Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pada manajemen kurikulum dan pembelajaran, semua sekolah telah melaksanakan pembelajaran berdasarkan kurikulum.

Tersedia Online di

http://journal.unublitar.ac.id/pendidikan/index.php/Riset_Konseptual

Sejarah Artikel

Diterima pada : 01-07-2023

Disetujui pada : 20-07-2023

Dipublikasikan pada : 31-07-2023

Kata Kunci:

Implementasi, Manajemen Berbasis Sekolah, Sekolah Dasar

DOI:

http://doi.org/10.28926/riset_konseptual.v7i3.709

PENDAHULUAN

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) atau *School-Based Management* menjadi salah satu kebijakan strategis pendidikan di bawah amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. MBS itu sendiri mengandung makna bahwa sekolah diberikan otonomi atau kewenangan secara luas untuk dapat leluasa mengatur sumber daya dan dana dengan mengalokasikannya berdasarkan prioritas kebutuhan di daerah. Mustiningsih (2015) dan Cornito (2021) memperjelas konsep MBS sebagai salah satu reformasi sekolah yang menitikberatkan pada desentralisasi sekolah, dimana sekolah itu sendiri memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan, mengembangkan sumber daya internal, serta menggunakan sumber-sumber pembelajaran. Dengan demikian, MBS memiliki tujuan untuk mendorong kemandirian sekolah melalui pengelolaan sumber daya setempat yang tersedia. Selain itu, MBS juga mengikutsertakan semua unsur terkait (*stake holder*) dalam penentuan keputusan demi kemajuan dan peningkatan mutu sekolah

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2013) menjelaskan bahwa MBS hadir dengan membawa desentralisasi manajemen pendidikan untuk memberikan wadah kepada pihak terkait menyelenggarakan sistem pendidikan berdasarkan kebutuhan dan kondisi di setiap daerah. Pada kebijakan sebelumnya di masa lalu, manajemen pendidikan dilaksanakan secara terpusat (sentralisasi) dengan wewenang yang sangat terbatas bagi Pemerintah Daerah maupun sekolah setempat. Dengan mengubah hal tersebut menjadi desentralisasi, penyerahan tanggung jawab dan sumber daya memberikan kesempatan kepada sekolah untuk mengidentifikasi, mengelola, dan memenuhi kebutuhannya sendiri. Dengan mengambil keputusan secara mandiri di tingkat sekolah, pemanfaatan sumber daya yang didalamnya juga mencakup pembiayaan sekolah diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan sekolah dan peserta didik setempat.

Ambarita (2016) secara jelas menyebutkan bahwa sejak tahun 1999, MBS telah diimplementasikan di sekolah-sekolah di Indonesia dengan fokus pada tiga komponen

yaitu manajemen, PAKEM (pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan), dan peran serta masyarakat. Kemudian, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, maka pelaksanaan MBS dikembangkan menjadi 7 (tujuh) komponen/komponen, yaitu: (1) manajemen kurikulum dan pembelajaran, (2) manajemen peserta didik, (3) manajemen pendidik dan tenaga kependidikan, (4) manajemen keuangan dan pembiayaan, (5) manajemen sarana dan prasarana, (6) manajemen hubungan sekolah dan masyarakat, serta (7) manajemen budaya dan lingkungan sekolah. Ketujuh komponen tersebut saling bersinergi untuk mewujudkan harapan bersama mengembangkan sekolah sesuai kondisi dan potensinya. Moradi et al., (2016) juga menambahkan bahwa tujuan penyelenggaraan MBS di Indonesia adalah meningkatkan akuntabilitas dan tanggung jawab orang tua dan peserta didik serta meningkatkan peran dewan sekolah.

Dalam penerapannya, MBS telah dilaksanakan di Indonesia pada semua jenjang pendidikan. Untuk jenjang Sekolah Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar (2013) menyatakan bahwa secara umum, MBS telah dilaksanakan di sekolah-sekolah dasar dalam tingkatan yang bervariasi di Indonesia. Terdapat SD yang telah menerapkan MBS dengan kategori baik. Selain itu, terdapat pula SD yang menerapkan MBS dengan kategori sedang maupun kategori awal/kurang. Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2013 berupaya untuk mencapai target sasaran renstra tahun 2014 yaitu sebanyak 90% SD di Indonesia melaksanakan MBS dengan kategori baik.

Selanjutnya, implementasi MBS di Indonesia dievaluasi pada tahun 2000, 2002, 2005, dan 2010. Hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa salah satu dampak positif penerapan MBS adalah meningkatnya peran serta masyarakat terhadap pendidikan di SD. Oleh karena itu, keberlanjutan program MBS di Indonesia perlu tetap dilaksanakan. Keberlanjutan program MBS ini dilandasi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah lainnya yang relevan, serta beberapa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, antara lain Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013).

Implementasi MBS pada jenjang SD sederajat di Indonesia telah banyak diteliti dan dilaporkan oleh peneliti terdahulu. Penelitian terbaru dilakukan Tontowi dkk., (2022) mengenai implementasi MBS untuk meningkatkan mutu pendidikan di SDN 2 Kaliwenang, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa proses pembelajaran dilakukan berdasarkan kurikulum yang ada, manajemen tenaga kependidikan dilakukan dengan penyeleksian calon pengajar maupun pegawai dengan cermat, sarana dan prasarana tersedia dengan baik, sekolah sudah melibatkan masyarakat dalam event-event sekolah, serta melaksanakan transparansi kepada *stakeholder* dengan mengikutsertakan warga sekolah dan komite dalam penyelenggaraan program sekolah.

Penelitian sebelumnya terkait dengan implementasi MBS di jenjang SD dilakukan oleh Muhammad & Rahman (2017) di SD Islam Insan Kamil Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa implementasi MBS pada sekolah di SD ini sudah berjalan dengan efektif dan efisien sesuai tujuan dan sasaran MBS. Pengembangan kurikulum dan pembelajaran di sekolah ini dilaksanakan dengan melibatkan pengawas, guru, komite sekolah, serta orang tua. Selain itu, sebagai sekolah swasta, SD ini cukup mandiri dalam mencari pembiayaan operasional sekolah, menseleksi guru, memilih peserta didik, mengatur jam belajar di sekolah, menata ruangan-ruangan yang tersedia di sekolah, serta menentukan kegiatan akademik dan non akademik yang menjadi prioritas sekolah. Pada aspek manajemen peserta didik, sekolah melakukan kegiatan pembinaan dan pengembangan peserta didik, seperti: pembinaan karakter peserta didik, baca tulis Al-Qur'an, mengadakan muatan lokal Bahasa Inggris dan Bahasa Arab, serta menawarkan ekstrakurikuler yang beragam. Pengelolaan manajemen pembiayaan

sekolah dilakukan sesuai perencanaan pembiayaan dalam Rencana Kerja Sekolah (RKS), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM).

Penelitian terakhir dilakukan oleh Ibrahim (2015) mengenai implementasi MBS di SDN Sakti Pidie, Aceh. Hasil implementasi MBS di sekolah ini berjalan dengan baik, terutama dalam menegakkan kedisiplinan guru dan peserta didik. Semua warga sekolah dilibatkan dalam menyusun program MBS. Penggunaan operasional keuangan sekolah yang digunakan selalu didiskusikan bersama warga sekolah melalui rapat maupun melalui musyawarah. Dalam hal manajemen pendidik, kualifikasi guru umumnya adalah S1 sehingga sudah terpenuhi syarat administratif sebagai pendidik. Jumlah tenaga guru telah memadai dengan minimal satu sampai dua orang guru per mata pelajaran. Kegiatan KKG juga diselenggarakan sebagai salah satu sarana untuk berdiskusi, berbagi materi, informasi, dan kegiatan lainnya antar guru di sesama Sekolah Dasar lainnya untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, serta bagaimana melaksanakan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.

Berdasarkan ketiga hasil penelitian diatas, dapat diketahui bahwa telah banyak SD di wilayah Indonesia yang melaksanakan MBS sejak lama. Ketujuh komponen MBS telah diterapkan sesuai dengan karakteristik, situasi, dan kondisi sekolah masing-masing. Atas dasar hal tersebut, peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi MBS di SD wilayah Kota Banjarmasin dalam menerapkan ketujuh komponen tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsikan gambaran mengenai pelaksanaan MBS sebagai salah satu usaha untuk menemukan potensi sekolah yang dapat dikembangkan dan ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan, terutama di jenjang SD

METODE

Penelitian ini dijalankan dengan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan MBS di beberapa SD di Kota Banjarmasin. Sebanyak 20 orang mahasiswa angkatan 2020 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP PGRI Banjamasin diberikan *project* secara berkelompok pada mata kuliah MBS untuk melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah dan atau Wakil Kepala Sekolah dan atau guru di 5 (lima) SD di Kota Banjarmasin yang dipilih secara acak untuk menggali informasi mengenai implementasi 7 (tujuh) komponen MBS di sekolah-sekolah tersebut. Kelima SD yang diwawancarai tersebut yaitu: (1) SDN Kelayan Timur 5 Banjarmasin, (2) SDN Percontohan 5 Surgi Mufti Banjarmasin, (3) SDN Kelayan Barat 3 Banjarmasin, (4) SD Muhammadiyah 9 Banjarmasin, serta (5) SDIT Al-Firdaus Banjarmasin.

Setelah melaksanakan wawancara di lokasi sekolah diatas, kelompok-kelompok mahasiswa tersebut diharuskan membuat laporan hasil wawancara yang berisi implementasi tujuh komponen MBS di sekolah-sekolah tersebut. Poin-poin yang harus dilaporkan oleh mahasiswa dalam laporan hasil wawancara tersebut yaitu: (1) identitas sekolah yang memuat nama SD, alamat SD, nama Kepala Sekolah, (2) pelaksanaan tujuh komponen MBS di SD yang dideskripsikan secara jelas, serta (3) dokumentasi kegiatan wawancara dengan pihak sekolah. Secara rinci, daftar pertanyaan wawancara yang diajukan kepada pihak sekolah sekaligus sebagai instrumen penelitian ini dicantumkan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Aspek Tujuh Komponen MBS yang Diwawancara Kepada Pihak Sekolah

No	Komponen MBS	Pertanyaan Wawancara
1	Manajemen kurikulum dan pembelajaran	a. Bagaimana sekolah melakukan perencanaan implementasi kurikulum dan pembelajaran? b. Apakah pelaksanaan pembelajaran di sekolah sudah sesuai dengan langkah-langkahnya (kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup)? c. Apakah penilaian pembelajaran sudah sesuai dengan konsep evaluasi (pelaksanaan penilaian, analisis hasil penilaian, dan tindak lanjut hasil penilaian)? d. Bagaimana sekolah menentukan mata pelajaran muatan local

2	Manajemen peserta didik	<ul style="list-style-type: none"> a. Bagaimana sekolah melakukan penerimaan peserta didik baru (PPDB)? b. Bagaimana sekolah melakukan evaluasi dan pelaporan kemajuan belajar peserta didik? c. Bagaimana sekolah pembinaan karakter disiplin peserta didik? d. Bagaimana sekolah melakukan program bimbingan dan konseling (BK) kepada peserta didik? e. Bagaimana sekolah melakukan program kesehatan dan keamanan kepada peserta didik?
3	Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> a. Bagaimana sekolah melakukan perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan? b. Bagaimana sekolah melakukan pengadaan dan perekrutan pendidik dan tenaga kependidikan? c. Bagaimana sekolah melakukan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan tupoksinya?
4	Manajemen sarana dan prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Bagaimana sekolah melakukan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana sekolah? b. Bagaimana sekolah pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sekolah? c. Bagaimana sekolah melakukan pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah? d. Bagaimana sekolah melakukan inventarisasi sarana dan prasarana sekolah? e. Bagaimana sekolah melakukan penataan sarana dan prasarana sekolah?
5	Manajemen keuangan dan pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Darimana asal sumber keuangan dan pembiayaan sekolah? Apakah bersumber dari: <ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah (pusat/propinsi/pemda setempat) - Masyarakat orang tua/wali peserta didik - Masyarakat bukan orang tua/wali peserta didik, seperti: sponsor dari Lembaga keuangan dan perusahaan, sumbangan perusahaan, lembaga social, donator, tokoh masyarakat, alumni, dsb b. Bagaimana sekolah melakukan perencanaan dan penyusunan RKAS? c. Bagaimana sekolah merealisasikan RKAS? d. Bagaimana sekolah melakukan evaluasi RKAS?
6	Manajemen hubungan sekolah dan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Bagaimana sekolah mengelola hubungan antar guru sehari-hari? b. Bagaimana sekolah mengelola hubungan guru dengan peserta didik? c. Bagaimana sekolah membina hubungan dengan masyarakat di sekitar sekolah? d. Bagaimana pelibatan masyarakat dalam kegiatan sekolah yang sudah pernah dilakukan?
7	Manajemen budaya dan lingkungan sekolah	<ul style="list-style-type: none"> a. Apakah visi, misi, dan tujuan sekolah yang terpasang di dinding/tempat lainnya di sekolah? b. Apakah ada pembiasaan sehari-hari yang bernuansa religious, moral, akhlak, dan social dilakukan di sekolah? c. Bagaimana sekolah melakukan penataan dan perawatan lingkungan social sekolah, seperti: menciptakan keamanan, relasi kekeluargaan, kebersamaan, dan sejenisnya? d. Bagaimana sekolah melakukan penataan lingkungan kerja sekolah, seperti: pengaturan jadwal acara dan aktivitas sekolah, penciptaan budaya kerja, penerapan disiplin dan tata tertib, evaluasi atas peningkatan disiplin dan prestasi peserta didik, dan sejenisnya?

Diadaptasi dari Mulyasa (2002), Murtiningsih (2015), dan Rini dkk (2020)

Hasil wawancara berdasarkan daftar pertanyaan wawancara seperti yang tertera pada tabel 1 dideskripsikan oleh kelompok-kelompok mahasiswa dalam bentuk laporan tertulis. Mereka diberikan keleluasaan untuk mendeskripsikan hasil wawancara dengan pihak sekolah, sehingga akan terlihat bagaimana implementasi tujuh komponen MBS pada kelima sekolah tersebut. Rangkuman hasil keseluruhan implementasi MBS di lima sekolah yang dituliskan oleh mahasiswa dalam laporannya kemudian dianalisis oleh peneliti dengan menggunakan langkah analisis data yang dikemukakan oleh Miles and Huberman yaitu mereduksi data, menyajikan data setelah direduksi, serta memverifikasi data atau menarik kesimpulan.

Langkah pertama analisis data pada penelitian ini adalah mereduksi data. Pada tahap ini, peneliti merangkum semua hasil wawancara mengenai implementasi MBS pada lima sekolah yang telah dituliskan oleh mahasiswa. Selanjutnya, peneliti melakukan seleksi pada hasil wawancara, menemukan hal-hal substantif terkait

dengan hasil wawancara, serta menemukan kecenderungan hasil pada semua aspek implementasi MBS di kelima sekolah yang diteliti. Selanjutnya, pada tahap kedua analisis data, peneliti menyajikan data yang telah direduksi dalam bentuk deskripsi dimana semua aspek MBS pada Tabel 1 dinarasikan berdasarkan hasil wawancara dengan kelima sekolah tersebut. Kemudian, pada tahap akhir analisis data, peneliti mendeskripsikan atau menyimpulkan keseluruhan hasil implementasi MBS pada lima SD tersebut untuk didiskusikan dengan teori, referensi, maupun literatur yang relevan.

HASIL dan PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini mengacu pada rangkuman hasil wawancara mengenai implementasi MBS pada lima SD di Kota Banjarmasin dengan berpatokan pada instrumen tujuh komponen yang tercantum pada Tabel 1. Selanjutnya, hasil penelitian yang ditampilkan diikuti dengan pembahasan berdasarkan literatur maupun hasil penelitian sebelumnya.

HASIL

Hasil penelitian ini mengacu pada tujuh komponen MBS yang tercermin pada wawancara dengan pihak sekolah di lima SD di Kota Banjarmasin. Rangkuman hasil wawancara tersebut disajikan sebagai berikut:

1. Implementasi Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran

Implementasi manajemen kurikulum dan pembelajaran sebagai komponen pertama MBS pada lima Sekolah Dasar di Kota Banjarmasin disajikan sebagai berikut.

a. Aspek perencanaan implementasi kurikulum dan pembelajaran

Sebanyak empat SD pada penelitian ini masih menggunakan Kurikulum 2013 dan belum menggunakan Kurikulum Merdeka. Direncanakan pada tahun yang akan datang, keempat sekolah tersebut akan mulai beradaptasi dan mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Selain itu, terdapat satu sekolah yang saat ini mengimplementasikan dua kurikulum yaitu Kurikulum Merdeka (dikelas I dan IV), serta Kurikulum 2013 (dikelas II, III, V, dan VI). Perencanaan pembelajaran di semua SD ini mengacu pada program semester sesuai aturan dari Pemerintah pusat

b. Langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran

Mayoritas guru di sekolah-sekolah ini sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran (kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup) sesuai dengan RPP dan perangkat pembelajaran lainnya

c. Penilaian pembelajaran berdasarkan konsep evaluasi

Mayoritas sekolah melakukan penilaian pembelajaran yang beragam. Evaluasi dilaksanakan dengan memberi ulangan, hafalan, unjuk kerja di buku kerja siswa, memberikan soal-soal latihan, kerja individu/kelompok, dan penilaian lainnya sesuai dengan materi yang diberikan. Rapat evaluasi pelaksanaan pembelajaran juga dilakukan oleh guru-guru di sekolah-sekolah tersebut

d. Penentuan mata pelajaran muatan lokal

Sekolah menentukan mata pelajaran muatan lokal berdasarkan pertimbangan yang beragam, seperti: ketersediaan pengajar, fasilitas yang menunjang mata pelajaran muatan lokal yang diberikan, menyesuaikan visi, misi, dan kekhasan sekolah, keperluan menanamkan nilai-nilai karakter, serta pertimbangan lain berdasarkan kondisi sekolah

Berdasarkan hasil diatas, dapat diketahui bahwa kelima Sekolah Dasar pada penelitian ini telah melaksanakan manajemen kurikulum dan pembelajaran dengan baik. Walaupun baru satu sekolah yang menerapkan Kurikulum Merdeka (meskipun masih di dua rombongan kelas), pelaksanaan pembelajaran tetap berlangsung sesuai dengan kurikulum yang digunakan oleh sekolah. Selain itu, evaluasi pembelajaran juga dilaksanakan dengan baik. Semua sekolah juga telah menetapkan mata pelajaran muatan lokal yang beragam sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing.

2. Implementasi Manajemen Peserta Didik

Implementasi manajemen peserta didik sebagai komponen berikutnya dalam MBS pada lima Sekolah Dasar di Kota Banjarmasin disajikan sebagai berikut.

a. Penerimaan peserta didik baru (PPDB)

Sebanyak tiga SD negeri pada penelitian ini melaksanakan PPDB sesuai ketentuan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dengan melakukan seleksi administrasi, seperti: mempertimbangkan aspek usia calon peserta didik dan zonasi tempat tinggal. Adapun sebanyak dua SD swasta pada penelitian ini juga melaksanakan PPDB dengan seleksi usia sesuai ketentuan. Akan tetapi, seleksi zonasi tempat tinggal tidak dilakukan. Calon peserta didik dari mana saja dapat bersekolah disana

b. Evaluasi dan pelaporan kemajuan belajar peserta didik

Semua sekolah rutin mengadakan rapat bulanan/semester untuk mengevaluasi dan membahas kemajuan belajar peserta didik. Pelaporan kemajuan belajar peserta didik dilakukan dengan pembagian raport per semester kepada orang tua

c. Pembinaan karakter disiplin peserta didik

Semua sekolah memiliki tata tertib yang dipasang di dinding-dinding kelas dan dinding-dinding ruangan lain di sudut sekolah, seperti: disiplin mengenai kelengkapan atribut sekolah, disiplin mengikuti upacara bendera setiap hari Senin, disiplin mengenai jam masuk sekolah, disiplin mengenai kontrak belajar, disiplin mengenai kebiasaan dan perilaku sehari-hari di sekolah, dan sebagainya, serta sanksi dari pelanggaran mengenai hal tersebut. Kontrol kedisiplinan dilakukan di kelas masing-masing

d. Program bimbingan konseling kepada peserta didik

Semua sekolah melaksanakan program penyuluhan/BK, tetapi sifatnya masih insidental menyesuaikan ada tidaknya peserta didik yang perlu diberikan konseling. Bila ada kasus peserta didik yang memerlukan BK, maka peserta didik tersebut akan dibimbing oleh wali kelasnya terlebih dahulu. Apabila tidak tertangani, maka wali kelas meminta saran/masukan kepada Kepala Sekolah. Dalam hal ini, belum ada sekolah yang secara khusus menggunakan jasa psikolog untuk memberikan program BK kepada peserta didik

e. Program kesehatan dan keamanan kepada peserta didik

Semua sekolah bekerjasama dengan pihak Puskesmas setempat untuk melakukan pemeriksaan/penyuluhan/edukasi kesehatan peserta didik. Untuk program keamanan, semua sekolah menjaga keamanan dengan menutup pintu gerbang saat jam sekolah dimulai. Kontrol keamanan lainnya diserahkan kepada wali kelas masing-masing untuk memonitor peserta didik. Terdapat satu sekolah yang pernah melakukan razia secara insidental, seperti: peserta didik yang menggunakan perhiasan/atribut lain berlebihan, adanya laporan benda hilang, atau sejenisnya

Berdasarkan hasil diatas, implementasi manajemen peserta didik pada kelima Sekolah Dasar di Kota Banjarmasin telah terlaksana dengan baik. Semua sekolah melaksanakan PPDB sesuai dengan ketentuan. Evaluasi kemajuan peserta didik dilakukan dengan pembagian raport kepada orang tua. Berikutnya, sekolah memiliki tata tertib sebagai kontrol kedisiplinan peserta didik. Selain itu, dalam melaksanakan program BK, sekolah melaksanakannya dengan melihat kasus peserta didik terlebih dahulu. Untuk program kesehatan, semua sekolah bekerjasama dengan Puskesmas setempat untuk pemeriksaan kesehatan peserta didik

3. Implementasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Implementasi manajemen pendidik dan tenaga kependidikan sebagai komponen MBS pada lima Sekolah Dasar di Kota Banjarmasin disajikan sebagai berikut.

a. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan

Terdapat satu sekolah yang memiliki struktur persebaran pendidik untuk setiap kelas, seperti: tidak adanya perpindahan guru kelas menjadi wali kelas, sedangkan sekolah lainnya sudah terpenuhi semua antara kebutuhan pendidik dan jumlah rombongan belajar yang ada.

b. Pengadaan dan perekrutan pendidik dan tenaga kependidikan

Dua sekolah swasta melakukan perekrutan secara mandiri dengan membuka lowongan apabila terdapat kekurangan/kekosongan pendidik dan tenaga kependidikan,

sedangkan sekolah negeri lainnya berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat untuk melapor/mengajukan penempatan tenaga pendidik dan kependidikan. Selama masa menunggu penempatan tenaga pendidik dari Dinas Pendidikan tersebut, sekolah memberdayakan pendidik yang tersedia di sekolah terlebih dahulu

c. Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan tupoksinya

Pembinaan pendidik dilakukan dengan melalui rapat dinas dengan seluruh pendidik, mengikutkan pendidik pada seminar-seminar yang berkaitan dengan tupoksinya, mewajibkan pendidik untuk mengikuti KKG, dan pembinaan lain yang sifatnya dilakukan mandiri oleh sekolah sesuai dengan kebutuhan. Sementara itu, satu sekolah swasta yang merupakan sekolah Islam mengharuskan pendidik untuk memiliki sertifikat pendidik Al-Qur'an, sehingga bagi yang belum memiliki sertifikat tersebut, sekolah mengadakan pembinaan secara khusus di hari tertentu.

Berdasarkan hasil diatas, manajemen pendidik dan tenaga kependidikan di Sekolah Dasar Kota Banjarmasin sudah terlaksana dengan baik dalam hal perencanaan, pengadaan, perekrutan, serta pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan. Sekolah negeri berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dalam kaitannya dengan pengadaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, sedangkan sekolah swasta lainnya melakukan perekrutan secara mandiri. Dalam pembinaan pendidik dan tenaga pendidik, semua sekolah sudah melakukan usaha-usaha konstruktif, seperti: mengikutkan pendidik pada seminar-seminar, KKG, maupun pembinaan lain yang positif sesuai dengan kondisi di lapangan.

4. Implementasi Manajemen Sarana dan Prasarana

Implementasi manajemen sarana dan prasarana di lima Sekolah Dasar di Kota Banjarmasin disajikan sebagai berikut:

a. Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana (sarpras) sekolah

Untuk sekolah negeri, kebutuhan sarpras sekolah disusun dalam RKAS yang disesuaikan dengan pagu dari pusat. Selanjutnya, rencana kebutuhan sarpras tersebut dibuat anggarannya dan diusulkan ke Dinas Pendidikan. Sekolah negeri juga tidak bisa sembarangan membeli kebutuhan sarpras sekolah karena semua harus dicantumkan dalam RKAS terlebih dahulu. Sementara itu, sekolah swasta melakukan pendataan secara mandiri mengenai kebutuhan sarpras dengan mengagendakannya dalam rapat kerja untuk diusulkan kepada pihak yayasan.

b. Pengadaan sarana dan prasarana (sarpras)

Untuk sekolah negeri, pengadaan sarpras harus sesuai dengan yang dianggarkan pada RKAS dengan menunggu pencairan dananya dari pusat. Sekolah harus membelanjakan sesuai dengan peruntukan yang dianggarkan, sedangkan sekolah swasta berkoordinasi dengan yayasan atau pimpinan cabang mengenai pembelanjaan sekolah berkaitan dengan kebutuhan sarpras

c. Pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana (sarpras)

Semua warga sekolah terlibat dalam pemeliharaan dan perawatan sarpras. Beberapa sekolah memiliki koordinator kebersihan dan perlengkapan/petugas kebersihan tersendiri untuk pengawasan dan penggunaan sarpras sesuai fungsinya. Adapun sarpras yang bersumber dari dana pusat, pengawasannya dilakukan oleh bagian aset pada Dinas Pendidikan untuk diberikan stempel khusus

d. Inventarisasi sarana dan prasarana (sarpras)

Sekolah memiliki buku inventaris khusus yang berisi data sarpras yang dimiliki beserta tahun dibelinya sarpras tersebut. Untuk sekolah negeri, bila ada sarpras yang rusak/tidak bisa digunakan lagi/ingin dibuang ataupun diganti, pihak sekolah membuat berita acara penghapusan sarpras untuk kemudian mengajukan penggantian, sedangkan sekolah swasta memberikan label terhadap sarpras yang dibeli. Pembelian sarpras di sekolah swasta menggunakan dana yayasan yang diatur oleh bendahara sekolah.

e. Penataan sarana dan prasarana (sarpras) sekolah

Penataan sarpras dilakukan sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan tempat dan peruntukan. Sarpras dapat ditata berubah-ubah sesuai kebutuhan sekolah. Satu

sekolah swasta menyatakan bahwa penataan sarpras juga dibahas dalam rapat kerja dengan semua unit yang terdapat di sekolah.

Berdasarkan hasil diatas, implementasi manajemen sarana dan prasarana pada kelima Sekolah Dasar di Kota Banjarmasin telah terlaksana dengan baik menyesuaikan dengan kondisi sekolah. Pengadaan, pengawasan, pemeliharaan, inventarisasi, serta penataan sarana dan prasarana dilakukan dengan baik mengacu pada aturan dari Dinas Pendidikan untuk sekolah negeri. Adapun sekolah swasta melaksanakan hal tersebut berdasarkan aturan yang dibuat bersama dengan pihak yayasan sekolah.

5. Implementasi Manajemen Keuangan dan Pembiayaan

Implementasi manajemen keuangan dan pembiayaan di lima Sekolah Dasar di Kota Banjarmasin disajikan sebagai berikut:

a. Asal sumber keuangan/pembiayaan sekolah

Sumber keuangan/pembiayaan sekolah negeri semuanya berasal dari Pemerintah melalui dana BOS. Untuk sekolah swasta, mereka juga menerima dana BOS dari Pemerintah disamping dari orang tua/wali peserta didik melalui pembayaran SPP

b. Perencanaan dan penyusunan RKAS

Untuk sekolah negeri, sekolah menyusun RKAS tiap tahun sesuai dengan pagu yang ditentukan oleh Kementerian pusat dan juga berdasarkan data Dapodik. Anggaran disusun sesuai dengan kebutuhan sekolah. Kepala Sekolah dan bendahara sekolah memiliki peran besar untuk perencanaan dan penyusunan RKAS ini. Adapun sekolah swasta, membuat RKAS diakhir tahun pelajaran untuk diajukan di awal tahun pelajaran baru

c. Realisasi RKAS

Sekolah negeri menunggu anggaran yang diusulkan cair terlebih dahulu dari Pemerintah untuk mengimplementasikan RKAS. Sekolah menggunakan anggaran tersebut sesuai prosedur. Untuk dana BOS sendiri, pencairannya sebanyak tiga kali dalam setahun. Adapun untuk sekolah swasta, sekolah menerima dana dari yayasan setelah pengusulan anggaran disetujui. Laporan penggunaan dana dibuat secara tertib dengan menyertakan bukti-bukti atau kuitansi pembelanjaan.

d. Evaluasi RKAS

Untuk sekolah negeri, evaluasi RKAS dilakukan dalam rapat kerja guru. Laporan penggunaan dana BOS dikirimkan ke Dinas Pendidikan pada unit/bagian yang menangani BOS. Terdapat verifikator di Dinas Pendidikan yang mengevaluasi laporan penggunaan dana BOS. Adapun sekolah swasta yang dinaungi yayasan, evaluasi juga dilakukan melalui rapat kerja dewan guru dengan mengumpulkan laporan mengenai penggunaan anggaran

Berdasarkan hasil diatas, implementasi manajemen keuangan dan pembiayaan pada kelima Sekolah Dasar di Kota Banjarmasin telah terlaksana dengan baik. Semua sekolah negeri memiliki sumber dana BOS yang bersumber langsung dari Pemerintah. Perencanaan, penyusunan, implementasi, serta evaluasi terhadap RKAS dilakukan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat. Adapun sekolah swasta yang dinaungi oleh yayasan pada penelitian ini juga menerima dana BOS dari Pemerintah. Selain itu, mereka juga mendapat sumber pembiayaan dari SPP peserta didik. Sekolah swasta juga melakukan hal yang sama dalam perencanaan, penyusunan, realisasi, serta evaluasi RKAS.

6. Implementasi Manajemen Hubungan Sekolah dan Masyarakat

Implementasi manajemen hubungan sekolah dan masyarakat di lima Sekolah Dasar di Kota Banjarmasin disajikan sebagai berikut:

a. Pengelolaan hubungan antar guru sehari-hari

Semua sekolah menggunakan asas kekeluargaan dalam mengelola hubungan antar guru, saling berkomunikasi/bertukar pendapat, saling membantu, saling menghormati dan menghargai, serta selalu menjalin kebersamaan dalam setiap

kegiatan dan pergaulan sehari-hari di sekolah. Kegiatan KKG juga termasuk upaya mengelola silaturahmi antar guru

b. Pengelolaan hubungan guru dengan peserta didik sehari-hari

Semua sekolah mengutamakan *attitude* dalam mengelola hubungan guru dengan peserta didik. Saling menghormati, mengutamakan adab, etika, keteladanan, serta menjaga batasan dalam pergaulan sehari-hari di sekolah antara guru dan peserta didik

c. Pembinaan hubungan dengan masyarakat di sekitar sekolah

Semua sekolah memiliki komite sekolah yang sifatnya membantu mengawasi, mengontrol, dan memberikan masukan terhadap pengelolaan sekolah. Selain itu, sekolah juga melibatkan masyarakat pada even-even tertentu, seperti: perpisahan peserta didik, Maulid Nabi Muhammad SAW, dan sebagainya. Dalam hal ini, sekolah biasanya mengundang tokoh masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar sekolah, seperti Ketua RT dan para wali peserta didik. Selain itu, sekolah yang berlokasi di tepi jalan juga menjalin komunikasi dengan baik dengan pedagang yang berjualan di sekitar sekolah agar tidak sampai mengganggu akses lalu lintas jalan di sekolah

d. Pelibatan masyarakat dalam kegiatan sekolah

Semua sekolah sudah melibatkan masyarakat dalam kegiatan sekolah tertentu seperti kegiatan PHBI. Selain itu, terdapat sekolah yang pernah mengundang orang tua peserta didik yang berprofesi tertentu untuk mejadi narasumber kegiatan di sekolah. Salah satu sekolah swasta pernah mengundang pengrajin sasirangan (kain tradisional khas Kalimantan Selatan) untuk mengenalkan siswa mengenai pembuatan sasirangan sebagai salah satu kegiatan implementasi Kurikulum Merdeka.

Berdasarkan hasil diatas, implementasi manajemen hubungan sekolah dan masyarakat pada kelima Sekolah Dasar di Kota Banjarmasin telah terlaksana dengan baik. Sekolah melakukan beragam aktivitas untuk membangun hubungan baik dengan masyarakat di sekitar sekolah dengan mengundang dan melibatkan mereka dalam kegiatan keagamaan, seperti PHBI, ceramah agama, maupun kegiatan sosial lainnya.

7. Implementasi Manajemen Budaya dan Lingkungan Sekolah

Implementasi manajemen budaya dan lingkungan sekolah di lima Sekolah Dasar di Kota Banjarmasin disajikan sebagai berikut:

a. Visi, misi, dan tujuan sekolah terpasang di dinding atau tempat lainnya di sekolah

Semua sekolah memiliki papan bertuliskan visi, misi, dan sekolah yang dipasang di dinding-dinding sekolah maupun di tempat-tempat lainnya sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing

b. Pembiasaan sehari-hari yang bermuansa religius, moral, akhlak, dan sosial

Semua sekolah sudah melakukan pembiasaan sehari-hari yang bermuansa religius, moral, akhlak, dan sosial, seperti: Jumat bersih, Jumat takwa, Jumat berbagi, berdoa sebelum dan sesudah belajar, mencium tangan guru, kantin kejujuran, dan sejenisnya. Terdapat sekolah yang memiliki kegiatan khusus di hari tertentu, seperti: peserta didik membaca buku bersama-sama setiap hari Selasa, setoran hafalan Al-Qur'an bagi sekolah Islam di hari tertentu, dan sejenisnya.

c. Penataan dan perawatan lingkungan sosial sekolah

Semua sekolah sudah melakukan penataan lingkungan sosial sekolah, seperti adanya jadwal piket. Untuk keamanan sekolah, semua sekolah memiliki satpam/security/staf keamanan serta bekerjasama dengan warga sekitar untuk pengawasan keamanan sekolah, terutama saat hari libur

d. Penataan lingkungan sekolah

Semua sekolah memiliki tata tertib guru, tata tertib berpakaian, hak dan kewajiban guru, dan sejenisnya. Lingkungan sekolah sudah ditata sedemikian rupa sesuai dengan kondisi masing-masing di sekolah tersebut

Berdasarkan hasil diatas, implementasi manajemen budaya dan lingkungan sekolah pada kelima Sekolah Dasar di Kota Banjarmasin telah terlaksana dengan baik. Sekolah melakukan pembiasaan sehari-hari yang bermuansa religius, moral, akhlak, dan sosial dengan cara melakukan kegiatan rutin di hari Jumat, seperti: Jumat bersih,

Jumat takwa, Jumat berbagi, dan aktivitas lain yang terjadwal. Dalam hal penataan lingkungan kerja di sekolah, semua sekolah memiliki tata tertib yang mengatur hak dan kewajiban guru, sehingga ada kontrol dalam pembentukan lingkungan kerja yang kondusif.

PEMBAHASAN

Manajemen berbasis sekolah (MBS) merupakan salah satu upaya yang dilaksanakan dalam rangka pemberian otonomi/otoritas/wewenang yang lebih besar kepada pihak sekolah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sekolah tersebut. Pendekatan ini berpijak pada pertimbangan dasar bahwa pemberian otoritas atau wewenang kepada sekolah bertujuan agar sekolah memiliki kemandirian untuk menghasilkan pengelolaan sekolah yang lebih efektif dan efisien (Muslihah, 2009). Tujuh komponen MBS menjadi acuan dalam melaksanakan kewenangan dalam pengelolaan sekolah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lima SD di Kota Banjarmasin yang diteliti telah melaksanakan aspek-aspek tujuh komponen tersebut berdasarkan kondisi dan situasi di sekolah masing-masing. Tidak ada sekolah yang sama persis dalam implementasi MBS karena kelima sekolah tersebut memiliki karakteristik, ciri khas, serta pola pengelolaan yang berbeda satu sama lain. Adanya kesamaan dalam implementasi MBS terdapat pada komponen tertentu yang telah standar diatur pelaksanaannya berdasarkan regulasi nasional.

Komponen MBS yang pertama adalah manajemen kurikulum dan pembelajaran. Kelima sekolah pada penelitian ini secara umum telah menerapkan proses pembelajaran dengan baik berdasarkan Kurikulum 2013 yang digunakan. Terdapat satu sekolah yang menggunakan dua kurikulum yaitu Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka. Penggunaan dua kurikulum ini merupakan bentuk peralihan bertahap dari kurikulum lama yaitu Kurikulum 2013 menuju Kurikulum Merdeka yang baru ditetapkan oleh Pemerintah. Adapun mata pelajaran muatan lokal di lima sekolah ini berbeda satu sama lain menyesuaikan dengan berbagai faktor, seperti: ketersediaan guru pengajar, kebutuhan masyarakat, fasilitas pembelajaran, serta faktor lainnya berdasarkan kebutuhan sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah telah menerapkan manajemen kurikulum dan pembelajaran berdasarkan aturan baku yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Manajemen kurikulum dan pembelajaran pada sistem pendidikan nasional mengandung serangkaian aktivitas yang melibatkan berbagai macam elemen yang saling berkaitan guna memberikan arahan pada penyelenggaraan kegiatan pendidikan secara menyeluruh. Mahrus (2021) menegaskan bahwa terdapat kaitan yang erat antara kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum mencakup isi ataupun materi yang harus dipelajari oleh semua pihak terkait, sementara pembelajaran mencakup pada kegiatan mempelajari hal-hal yang tercantum pada kurikulum tersebut. Dengan kata lain, kurikulum menjadi sebuah rencana yang akan diimplementasikan pada kegiatan pembelajaran. Pembelajaran tidak akan berjalan dengan efektif tanpa adanya kurikulum sebagai rencana. Begitu pula sebaliknya. Kurikulum tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya pembelajaran sebagai implementasi dari kurikulum tersebut. Berdasarkan hal tersebut, Amon & Bustami (2021) memperjelas bahwa sekolah memerlukan perencanaan dalam bentuk kurikulum yang terprogram dan sistematis agar pelaksanaan pembelajaran pada MBS dapat dijalankan sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, serta perkembangan daerah dan sekolah.

Hasil penelitian ini selanjutnya berkaitan dengan komponen kedua MBS yaitu manajemen peserta didik. Secara umum, kelima SD pada penelitian ini melaksanakan PPDB sesuai dengan aturan. Selain itu, evaluasi kemajuan peserta didik dilakukan dengan pembagian raport kepada orang tua. Terdapat berbagai aktivitas yang beragam pada kelima sekolah tersebut pada program pengembangan kedisiplinan, bimbingan konseling (BK), kesehatan, dan keamanan untuk peserta didik.

Manajemen peserta didik memiliki peran yang sangat penting pada implementasi MBS di sebuah sekolah. Berkaitan dengan hak tersebut, Muntatsiroh & Asmendri (2023) mempertegas bahwa pada prinsipnya, semua komponen MBS

lainnya akan diarahkan pada layanan kepada peserta didik. Hak dan perlakuan yang sama diberikan kepada setiap peserta didik dalam memperoleh layanan pendidikan. Manajemen peserta didik berfungsi mengatur atau mengelola urusan kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah berjalan dengan lancar. Dalam hal ini, PPDB sebagai kegiatan rutin sekolah, pelaporan kemajuan belajar peserta didik, pengembangan kedisiplinan, program BK, kesehatan, dan keamanan yang diberikan kepada peserta didik sejak mulai berstatus sebagai pelajar hingga ia lulus dari sekolah perlu dilakukan dengan baik oleh sekolah.

Hasil ketiga penelitian ini selanjutnya berkaitan dengan komponen ketiga MBS yaitu manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Lima SD yang diteliti pada penelitian ini menunjukkan hasil bahwa sekolah negeri berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dalam kaitannya dengan pengadaan tenaga pendidik dan kependidikan, sedangkan sekolah swasta melakukan perekrutan tenaga pendidik dan kependidikan secara mandiri. Selain itu, dalam hal pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, semua sekolah melakukan upaya-upaya komprehensif seperti: mengikutkan tenaga pendidik dan kependidikan pada kegiatan seminar-seminar, workshop, pelatihan, musyawarah pada forum KKG (Kelompok Kerja Guru), maupun kegiatan pembinaan mandiri lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Hal ini mengindikasikan bahwa manajemen pendidik dan tenaga kependidikan di lima SD tersebut dijalankan dengan baik sesuai dengan kondisi di sekolah masing-masing.

Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan (tendik) pada MBS menjadi keharusan untuk diterapkan di sekolah agar semua staf dapat menjalankan tugasnya. Tenaga pendidik memiliki fungsi untuk memberikan layanan berupa didikan dan pembelajaran kepada peserta didiknya, sedangkan tenaga kependidikan memiliki fungsi untuk memberikan layanan teknis dalam bentuk administrasi, pengelolaan, pendataan, serta layanan serupa lainnya guna menunjang kelancaran proses pendidikan pada satuan pendidikan. Pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan diarahkan pada tujuan untuk melayani peserta didik dengan sumber daya manusia yang memadai, sehingga semua roda operasional pendidikan pada sebuah sekolah dapat tercapai dengan maksimal (Nurussalami, 2022).

Hasil keempat pada penelitian ini yaitu implementasi sarana dan prasarana pada lima SD yang diteliti. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengadaan sarana dan prasarana disusun dalam RKAS yang diusulkan ke Dinas Pendidikan setempat. Pengadaan sarana dan prasarana harus tepat peruntukannya pada RKAS yang dibuat, sedangkan sekolah swasta berkoordinasi dengan pihak yayasan untuk kebutuhan sarana dan prasarana. Selain itu, pemeliharaan sarana dan prasarana melibatkan semua warga sekolah. Beberapa sekolah memiliki koordinator perlengkapan atau petugas kebersihan tersendiri untuk pengawasan penggunaan sarana dan prasarana. Inventarisasi sarana dan prasarana dilaksanakan dengan melakukan pencatatan di buku inventarisasi khusus dan pembuatan berita acara bagi sekolah negeri bila ada sarana dan prasarana yang ingin diganti atau tidak bisa digunakan lagi. Dengan demikian, implementasi manajemen sarana dan prasarana di lima sekolah ini sudah berjalan sesuai dengan aturan.

Manajemen sarana dan prasarana pendidikan memiliki fungsi mengatur, mengawasi, mengelola, serta menjaga sarana dan prasarana yang tersedia untuk menunjang keberlangsungan aktivitas proses pendidikan dengan optimal. Huda (2018) menyebutkan bahwa aspek sarana dan prasarana yang tepat akan dapat mendukung kinerja guru, yang bermuara pada terciptanya pembelajaran yang optimal. Dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai di sebuah sekolah, guru-guru akan lebih maksimal menjalankan tugasnya. Begitu pula dengan peserta didik dan warga sekolah lainnya. Ketersediaan sarana dan prasarana perlu dikelola dengan sedemikian rupa agar penggunaannya tepat sesuai dengan tujuan pendidikan.

Selanjutnya, pada manajemen keuangan dan pembiayaan, semua sekolah pada penelitian ini mendapatkan dana BOS dari Pemerintah untuk menunjang operasional sekolah. Adapun sekolah swasta juga mendapatkan pembiayaan dari SPP

yang dibayarkan peserta didik. Perencanaan dan penyusunan RKAS di sekolah negeri dilaksanakan sesuai dengan rentang waktu berdasarkan aturan. Dalam hal ini, Kepala Sekolah bersama bendahara sekolah merupakan tokoh sentral dalam penyusunan RKAS. Implementasi RKAS dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya dan dituangkan dalam laporan penggunaan dana BOS. Terakhir, sekolah negeri melaksanakan evaluasi RKAS melalui verifikasi oleh Dinas Pendidikan setempat, sedangkan sekolah swasta yang dinaungi yayasan melakukan evaluasi anggaran dalam rapat kerja untuk selanjutnya menyusun laporan penggunaan anggaran.

Manajemen keuangan dan pembiayaan dalam MBS menjadi hal yang penting dilakukan karena berkaitan dengan operasional berjalannya sebuah institusi. (Zahrudin et al., 2019) menggarisbawahi bahwa terdapat hubungan yang saling terkait antara aspek pendidikan dan aspek pembiayaan. Sebuah sistem pendidikan tidak dapat dijalankan tanpa adanya biaya operasional, sedangkan pembiayaan itu sendiri dibutuhkan guna menunjang terlaksananya semua aspek dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Oleh karena itu, manajemen keuangan dan pembiayaan yang efektif dan efisien menjadi salah satu indikator penting guna menunjang keberhasilan tujuan pendidikan tersebut.

Hasil keenam pada penelitian ini adalah implementasi manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Semua sekolah pada penelitian ini melakukan pengelolaan hubungan antar guru dan dengan peserta didik dengan menggunakan asas kekeluargaan, saling menghormati, saling menghargai, saling menjaga silaturahmi, etika, serta menjalin kebersamaan. Adapun membina hubungan dengan masyarakat sekitar sekolah juga dilaksanakan dengan melibatkan dan mengundang masyarakat sekitar, komite sekolah, serta orang tua, pada even tertentu, seperti: PHBI, perpisahan peserta didik, dan kegiatan sekolah lainnya. Terdapat pula sekolah yang mengajak peserta didik untuk terjun langsung ke masyarakat mempraktikkan hal-hal kontekstual berkaitan dengan materi pembelajaran. Implementasi ini mengindikasikan bahwa semua sekolah telah melakukan usaha maupun upaya-upaya membangun hubungan sosial yang baik dengan masyarakat.

Manajemen hubungan sekolah dan masyarakat memiliki peran penting dalam mewujudkan lingkungan sosial sekolah yang baik. Sebuah institusi pendidikan harus bersinergi dengan masyarakat. Hal ini kembali kepada hakikat manusia sebagai makhluk sosial dimana sekolah mutlak membutuhkan peran masyarakat untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Pelibatan serta pemberdayaan masyarakat pada aspek pendidikan sangat diperlukan agar penyelenggaraan pendidikan dapat terselenggara dengan optimal. Terciptanya hubungan yang harmonis antara masyarakat dan sekolah akan memberikan dampak pada pelayanan pendidikan yang baik demi kemajuan sekolah (Kurniawati & Pardimin, (2021); Adjei, (2021). Dengan demikian, akan tercipta hubungan sosial yang harmonis antara sekolah dan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan tujuan pendidikan (Widyanto, 2019).

Hasil terakhir yang ditunjukkan pada penelitian ini adalah implementasi manajemen budaya dan lingkungan sekolah. Kelima sekolah yang diteliti pada penelitian ini menunjukkan bahwa semua sekolah melakukan pembiasaan sehari-hari yang bernuansa religius, moral, akhlak, dan sosial dengan cara melakukan kegiatan rutin di hari Jumat, seperti: Jumat bersih, Jumat takwa, Jumat berbagi, dan aktivitas lain yang terjadwal. Dalam hal penataan lingkungan kerja di sekolah, semua sekolah memiliki tata tertib yang mengatur hak dan kewajiban guru sehingga ada kontrol dalam pembentukan lingkungan kerja yang kondusif. Semua sekolah juga memiliki visi dan misi yang jelas terpampang pada dinding sekolah. Budaya dan lingkungan sekolah yang baik dikondisikan sedemikian rupa pada kegiatan sehari-hari di sekolah untuk mendukung terciptanya suasana belajar yang nyaman.

Manajemen budaya dan lingkungan sekolah sebagai salah satu komponen MBS yang bertujuan untuk mengembangkan karakter positif peserta didik disamping juga menciptakan lingkungan kerja yang efektif bagi guru. Selain itu, manajemen budaya dan lingkungan sekolah juga berfungsi menciptakan lingkungan fisik,

psikologis, sosial, serta kultural sekolah yang kondusif untuk mengembangkan karakter dan nilai-nilainya kepada peserta didik. Karakter budaya yang menonjol pada lima sekolah ini adalah pembiasaan kegiatan yang bernuansa religius, seperti: berdoa bersama, jumat takwa, jumat berbagi, dan sejenisnya. Nilai-nilai ketakwaan dan keimanan ditonjolkan sebagai upaya membentuk peserta didik sebagai insan beragama.

Neprializa (2015) menjelaskan bahwa nilai-nilai keimanan dan ketuhanan dapat ditumbuhkan di lingkungan sekolah berdasarkan keyakinan masing-masing. Tujuan menumbuhkan nilai-nilai keimanan ini di sekolah adalah agar setiap peserta didik dapat membentuk dirinya menjadi manusia yang memiliki budi pekerti luhur. Selain itu, ketakwaan perlu ditanamkan kepada peserta didik melalui berbagai kegiatan sebagai insan beragama. Pembiasaan lain yang dilakukan di lima sekolah ini juga berkaitan dengan etika dan literasi, seperti: mengucapkan salam, membaca buku bersama di perpustakaan atau dikelas pada hari tertentu, dan sejenisnya.

Nizary & Hamami (2020) menambahkan bahwa pengembangan budaya dan lingkungan sekolah diharapkan tidak hanya mendukung pengembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Akan tetapi, pengembangan budaya sekolah ini turut mendukung pengembangan pembelajaran di kelas, kinerja guru, kinerja Kepala Sekolah, serta kinerja warga sekolah lainnya. Budaya keimanan dan ketakwaan yang ditonjolkan akan mendukung tercapainya nilai-nilai lainnya, seperti: kebersamaan, kesetiakawanan, serta gemar membaca di kalangan peserta didik dan guru.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim (2015) dan Tontowi dkk (2022) mengenai terlaksananya implementasi MBS berdasarkan tujuh komponen yang ada. Implementasi tujuh komponen MBS merupakan pekerjaan yang memerlukan komitmen bersama antar warga sekolah demi mencapai tujuan yang diharapkan. Kepala Sekolah sebagai tokoh sentral memiliki kewajiban untuk mengkoordinir pelaksanaan segala aspek MBS yang dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan sekolah. Keberhasilan implementasi MBS sebuah sekolah tentu memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi secara berkelanjutan menyesuaikan dengan dinamika sekolah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Implementasi MBS pada lima SD di Kota Banjarmasin sudah terlaksana dengan baik. Secara umum, kelima sekolah tersebut sudah menerapkan komponen-komponen MBS yang ada berdasarkan kondisi dan situasi masing-masing. Pada manajemen kurikulum dan pembelajaran, semua sekolah telah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum. Kemudian, pada manajemen peserta didik, semua sekolah melaksanakan PPDB sesuai dengan ketentuan dan melakukan beragam aktivitas dalam program pembinaan karakter disiplin, BK, kesehatan, dan keamanan kepada peserta didik. Selanjutnya, pada manajemen pendidik dan tendik, setiap sekolah memiliki ragam perencanaan, pengadaan, perekrutan, serta pembinaan pendidik dan tendik. Pada manajemen sarpras, semua sekolah memiliki ragam kebijakan dalam perencanaan, pengadaan, pengawasan, pemeliharaan, inventarisasi, dan penataan sarpras.

Adapun untuk manajemen keuangan dan pembiayaan, semua sekolah memperoleh dana BOS dari Pemerintah serta memiliki ragam perencanaan, penyusunan, implementasi, serta evaluasi pada RKAS. Untuk manajemen hubungan sekolah dan masyarakat, semua sekolah cukup baik dalam membina dan melibatkan masyarakat sekitar pada kegiatan sekolah tertentu. Terakhir, pada manajemen budaya dan lingkungan sekolah, semua sekolah memiliki visi dan misi yang jelas. Secara umum, komponen MBS terlaksana di kelima sekolah tersebut walaupun belum sepenuhnya sempurna. Implementasi MBS memerlukan perencanaan dan evaluasi secara berkelanjutan agar pelaksanaannya lebih baik lagi di masa yang akan datang.

DAFTAR RUJUKAN

- Ambarita, A. (2016). EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PILAR MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH DI SEKOLAH DASAR PROVINSI LAMPUNG. In *Jurnal Pendidikan Progresif* (Vol. 6, Issue 2, pp. 92–100).
- Amon, L., & Rajib Bustami, M. (2021). Implementation of School-Based Management in Curriculum and Learning Processes: a Literatur Review. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Menengah (Dikdasmen)*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/10.31960/dikdasmen-v1i1-1060>
- Aryeh-Adjei, A. A. (2021). Community Participation in the Management of Ghanaian Schools. *Issue SI, 10*, 79–95.
- Cornito, C. M. (2021). Striking a Balance between Centralized and Decentralized Decision Making: A School-Based Management Practice for Optimum Performance. *International Journal on Social and Education Sciences*, 3(4), 656–669. <https://doi.org/10.46328/ijonses.217>
- Huda, M. N. (2018). Optimalisasi Sarana dan Prasarana dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa. *Ta'dibi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(2), 51–69.
- Ibrahim. (2015). Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah pada SD Negeri Sakti Pidie. *Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 3(1), 116–125.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2013). *Panduan Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di Sekolah Dasar. Buku IV*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kurniawati, N. B., & Pardimin. (2021). Manajemen Hubungan Sekolah Dengan Masyarakat Dalam Mewujudkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar. *Media Manajemen Pendidikan*, 3(3), 470–479. <http://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/mmp>
- Mahrus, M. (2021). Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran dalam Sistem Pendidikan Nasional. *JIEMAN: Journal of Islamic Educational Management*, 3(1), 41–80. <https://doi.org/10.35719/jieman.v3i1.59>
- Moradi, S., Beidokhti, A. A., & Fathi, K. (2016). Comparative Comparison of Implementing School-Based Management in Developed Countries in the Historical Context: From Theory to Practice. *International Education Studies*, 9(9), 191. <https://doi.org/10.5539/ies.v9n9p191>
- Muhammad, S., & Rahman, M. (2017). IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH UNTUK MENINGKATKAN MUTU SEKOLAH DASAR ISLAM INSAN KAMIL BACAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN. *Edukasi-Jurnal Pendidikan*, 15(1), 610–620.
- Mulyasa, E. (2002). *Manajemen Berbasis Sekolah. Konsep, Strategi, dan Implementasi*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muntatsiroh, A., & Asmendri. (2023). Pentingnya Manajemen Peserta Didik untuk Meningkatkan Kualitas Peserta Didik. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5(1), 3083–3097.
- Muslihah, E. (2009). School Based Management: Concept Development and Its Implementation in Indonesia. *Al Qalam*, 26(3), 427–448.
- Mustiningsih. (2015). Masalah Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di Sekolah Dasar. *Manajemen Pendidikan*, 24(6), 498–505.
- Neprializa. (2015). MANAJEMEN BUDAYA SEKOLAH. *Manajer Pendidikan*, 9(3), 419–429.
- Nizary, M. A., & Hamami, T. (2020). Budaya Sekolah. *At-Tafkir: Jurnal Pendidikan, Hukum, Dan Sosial Keagamaan*, 13(2), 161–172.
- Nurussalami. (2022). Pengelolaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jurnal Intelektualita Prodi MPI*, 11(1), 125–138.
- Rini, R., Sukamto, I., Ridwan, & Hariri, H. (2019). School-Based Management in Indonesia: Decision-Making, Problems, and Problem-Solving Strategy. *International Conference on Progressive Education, Bandar Lampung*, 422, 229–235.

- Tontowi, A. H., Untari, M. F. A., & Kiswoyo. (2022). Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SDN 2 Kaliwenang Kabupaten Grobogan. *Wawasan Pendidikan*, 2(2), 600–606. <https://doi.org/10.26877/wp.v2i2.10064>
- Widyanto, I. P. (2019). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERKEMBANGAN PENDIDIKAN MELALUI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH. *Satya Sastraharing*, 3(2), 93–112. <https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/Satya-Sastraharing>
- Zahrudin, Arifin, Z., & Suhandi, A. (2019). Implementasi Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 26(1), 46–56.